



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WISNU BARLIANTO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **685321**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **8.421.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 507 m2/136 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.726.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/75 m2 di KOTA MALANG ,
WARISAN Rp. 1.161.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/304.5 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.887.600.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 402 m2/75 m2 di KOTA MALANG ,
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.645.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **317.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT/MINIBUS Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 216.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SPM SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **600.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **489.838.954**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **9.828.938.954**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **9.828.938.954**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.